

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR DAN PROPOSISI**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah kajian secara rinci tentang berbagai istilah, fakta, definisi, variabel dan teori yang digunakan sebagai pedoman atau dasar untuk menemukan subjek penelitian yang menjadi dasar penelitian yang diteliti untuk mencapai kebenaran. Kajian Pustaka berisi teori kepustakaan yang melandasi penelitian untuk mendukung pemecah masalah sebagai dasar analisis yang akan digunakan pada bab selanjutnya yang sehubungan dengan fokus penelitian ini. Serta penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai acuan dasar teori untuk mengembangkan kerangka pemikiran dan proposisi.

##### **2.1.1 Kajian Penelitian Terdahulu/Relevan**

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan topik permasalahan pengangguran dalam kaitannya dengan masalah pada skripsi ini perlu dipaparkan untuk memberikan tambahan wacana ilmiah mengenai bagaimana upaya yang perlu diambil pembuat keputusan *decision centered depelopment*, berikut ini hasil kajian penelitian terdahulu yang ada keterkaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai perbandingan bagi peneliti:

- 1) Nur Ismi tahun 2020. Penelitian tersebut berjudul “Efektivitas balai latihan kerja dalam mengurangi pengangguran Di Kabupaten Bone”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Balai Latihan Kerja belum maksimal

efektif dalam mengurangi pengangguran. Hal tersebut dilihat dari hasil analisis data dan penjelasan hasil penelitian ternyata pada tahun 2016-2018 jumlah peserta pelatihan di UPT BLK Bone yang dapat terserap di dunia kerja adalah sebesar 48,9%. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu dilakukan pada daerah yang berbeda. Sedangkan persamaan yaitu menganalisis strategi, program-program, kendala dalam mengurangi pengangguran.

- 2) Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Khalimatus Sa'diyah (2020) dengan judul "Efektivitas pelatihan kerja terhadap penurunan pengangguran di Kota Surabaya (studi pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya)". Hasil penelitian yaitu pelatihan kerja di Dinas Tenaga Kerja kurang efektif dilihat dari banyaknya data pengangguran di Kota Surabaya. Meskipun pelatihan kerja di Dinas Tenaga Kerja kurang efektif ada beberapa peran yang sudah mampu meningkatkan kualitas guna untuk mengurangi angka pengangguran di Kota Surabaya yaitu dengan menambah skill, pengetahuan, keterampilan dan pendidikan angkatan kerja Kota Surabaya. Perbedaan yang signifikan dengan penelitian ini yaitu dilakukan pada daerah yang berbeda, sedangkan persamaan yaitu menganalisis strategi, program-program, kendala dalam mengurangi pengangguran.
- 3) selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Irma Arfiani pada (2014) dengan judul "Kebijakan Menekan Angka Pengangguran Melalui Program Pelatihan Kerja di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan menekan angka pengangguran melalui program pelatihan kerja ini telah berjalan optimal. Peran Disnaker transos Kota Magelang ialah sebagai stabilisator, innovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana program pelatihan kerja. Terdapat 11 jenis pelatihan kerja dengan jumlah peserta keseluruhan sebanyak 240 orang. Hal-hal terkait tujuan, peserta, materi, metode, media dan manfaat pelatihan telah sesuai standard dan prosedur yang ditetapkan, selain itu *output* telah benar-benar sampai ke kelompok sasaran. Faktor penghambat dalam penyelenggaraan program yaitu berkaitan dengan ketersediaan waktu, instruktur, dan fasilitas. Faktor-faktor tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu dilakukan penelitian pada daerah yang berbeda. Sedangkan persamaan yaitu sama-sama menganalisis penurunan angka pengangguran melalui program pelatihan kerja melalui BLK.

Berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu dan penelitian yang saya adakan mempunyai persamaan ingin mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi penghambat ketenagakerjaan dalam mengurangi angka pengangguran serta upaya apa saja yang dilakukan oleh disnaker dalam mengurangi angka pengangguran dengan memanfaatkan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan standard dan prosedur yang ditetapkan.

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan topik yang terkait permasalahan ketenagakerjaan khususnya pengurangan angka pengangguran tampak pada tabel 2.1

**Tabel 2. 1 Kajian Penelitian Terdahulu**

<b>No.</b>	<b>Nama dan Judul</b>	<b>Metode dan Hasil</b>	<b>Persamaan dan Perbedaan</b>
1.	<p>Nama: Nur Ismi tahun (2020)</p> <p>Judul: Efektivitas balai latihan kerja dalam mengurangi pengangguran Di Kabupaten Bone</p>	<p>Metode: kualitatif deskriptif</p> <p>Hasil: Balai Latihan Kerja belum maksimal efektif dalam mengurangi pengangguran. Hal tersebut dilihat dari hasil analisis data dan penjelasan hasil penelitian ternyata pada tahun 2016-2018 jumlah peserta pelatihan di UPT BLK Bone yang dapat terserap di dunia kerja adalah sebesar 48,9%.</p>	<p>Persamaan: menganalisis strategi, program-program, kendala dalam mengurangi pengangguran.</p> <p>Perbedaan: dilakukan yaitu dilakukan pada daerah yang berbeda.</p>

2.	<p>Nama: Khalimatus Sa'diyah (2020)</p> <p>Judul: Efektivitas Pelatihan Kerja Terhadap Penurunan Pengangguran Di Kota Surabaya (Studi Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya).</p>	<p>Metode: kualitatif deskriptif</p> <p>Hasil: pelatihan kerja di Dinas Tenaga Kerja kurang efektif dilihat dari banyaknya data pengangguran di Kota Surabaya. Meskipun pelatihan kerja di Dinas Tenaga Kerja kurang efektif ada beberapa peran yang sudah mampu meningkatkan kualitas guna untuk mengurangi angka pengangguran di kota Surabaya yaitu dengan menambah skill, pengetahuan, keterampilan dan pendidikan angakatan</p>	<p>Persamaan:</p> <p>Menganalisis strategi, program-program, kendala dalam mengurangi pengangguran.</p> <p>Perbedaan:</p> <p>dilakukan pada daerah yang berbeda</p>
----	---	--	---

		kerja Kota Surabaya.	
3.	<p>Nama: Irma Arfiani (2014)</p> <p>Judul: Kebijakan Menekan Angka Pengangguran Melalui Program Pelatihan Kerja di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang</p>	<p>Metode: deskriptif kualitatif</p> <p>Hasil: kebijakan menekan angka pengangguran melalui program pelatihan kerja ini telah berjalan optimal. Peran Disnakertransos Kota Magelang ialah sebagai stabilisator, innovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana program pelatihan kerja.</p> <p>Terdapat 11 jenis pelatihan kerja dengan</p>	<p>Persamaan: menganalisis penurunan angka pengangguran melalui program pelatihan kerja melalui BLK.</p> <p>Perbedaan: Penelitian dilakukan pada daerah yang berbeda</p>

	<p>jumlah peserta keseluruhan sebanyak 240 orang.</p> <p>Hal-hal terkait tujuan, peserta, materi, metode, media dan manfaat pelatihan telah sesuai standard dan prosedur yang ditetapkan, selain itu output telah benar-benar sampai ke kelompok sasaran.</p> <p>Faktor penghambat dalam penyelenggaraan program yaitu berkaitan dengan ketersediaan waktu, instruktur, dan fasilitas. Faktor-faktor tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan mengoptimalkan</p>	
--	--	--

		sumber daya yang tersedia.	
--	--	----------------------------	--

(Sumber Jurnal Terdahulu)

### 2.1.2 Pengertian Administrasi

Administrasi diartikan sebagai suatu proses pengorganisasian sumber-sumber sehingga tugas pekerjaan dalam organisasi tingkat apa pun dapat dilaksanakan dengan baik. Proses administrasi akan melaksanakan tiga fungsi utama yang berhubungan erat dengan tiga angkatan umum dalam hierarki formal, yakni fungsi pengarahan organisasi, fungsi manajemen organisasi dan fungsi pengawasan. Maka dari itu administrasi mempunyai peranan yang sangat kerusial dan penting dalam semua aktivitas sebuah organisasi. Sebuah bentuk usaha dan aktivitas yang berhubungan dengan mengurus dan mengatur sebuah kebijakan agar dapat mencapai target atau tujuan organisasi. Baik organisasi swasta maupun organisasi pemerintah. Administrasi dalam arti sempit, yaitu kata *Administratie* (Bahasa Belanda), yang meliputi kegiatan: catat-mencatat, ketik mengetik, surat-menyerat, pembukuan ringan, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Jadi tatausaha adalah bagian kecil kegiatan dari pada administrasi yang akan dipelajari. Administrasi dalam arti luas dari kata *Administration* (Bahasa Inggris). Dibawah ini akan dikemukakan beberapa pendapat, arti atau definisi dari pada administrasi arti luas yaitu:

Menurut Leonard D. White dalam Syafiie 1999 dkk dikutip dari jurnal dalam buku Pasolong, n.d, (2017) yang berjudul “Teori Administrasi Negara” memberikan definisi yaitu :



Administrasi adalah suatu proses yang terdapat secara umum dalam segala usaha kelompok manusia, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik ukuran kecil maupun besar.

Berdasarkan uraian diatas peneliti berpendapat dari pengertian tersebut adalah bahwa dalam melakukan sebuah aktivitas di dalam organisasi tersebut bahwa administrasi sangat dibutuhkan dalam melakukan sebuah proses kegiatan dalam organisasi kecil maupun besar untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditentukan. Peneliti merasa kurang puas karena belum ada pembahasan mengenai dalam mencapai tujuan dalam administrasi apa yang menjadi faktor dalam mencapai tujuan apakah cukup sendiri, sehingga peneliti mengutip dari.

Menurut Sondang P. Siagian (2004:2) yang dikutip dalam buku Pasolong, n.d, (2017) yang berjudul “Teori Administrasi Publik”

Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan uraian diatas peneliti berpendapat bahwa administrasi proses untuk mengambil suatu keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan agar dalam pelaksanaan dalam proses kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi melalui administrasi dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Peneliti merasa kurang puas karena belum ada pembahasan mengenai apakah administrasi apakah tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari maka saya mengutip dari.

Menurut The Liang Gie (1993:9) yang dikutip dalam buku Pasolong, n.d, (2017) yang berjudul “Teori Administrasi Publik”, mengemukakan bahwa

Administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa administrasi merupakan suatu proses atau kegiatan yang tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari baik dalam organisasi kecil maupun besar dengan melibatkan sumber daya manusia yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

### **2.1.3 Pengertian Administrasi Publik**

Pengembangan pemikiran administrasi negara baru akan lebih tampak pada berubahnya paradigma administrasi negara menjadi administrasi publik. Perubahan yang terjadi berupa perubahan dimensi proses yang berbasis kinerja, struktur yang tidak anti kreativitas, nilai-nilai dan praktek birokrasi yang mengedepankan integritas etika publik, akuntabilitas dan transparansi, efisiensi dan efektivitas. Selain itu mendorong prinsip dalam memberi pelayanan, menganut prinsip keterbukaan (transparansi).

Istilah publik berasal dari Bahasa Inggris public yang berarti umum, masyarakat atau negara. Sebenarnya, dalam Bahasa Indonesia sesuai bila diberi terjemahan praja, hanya sejak zaman Belanda arti sebenarnya dari kata praja tersebut adalah rakyat, sehingga untuk pemerintah yang melayani keperluan seluruh rakyat diberi istilah pamong praja (pelayan rakyat).

Definisi publik itu sendiri menurut dalam bukunya yang berjudul “Ilmu Administrasi Publik” menyatakan arti dari publik adalah “Sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki”.

Menurut Felix A. Nigro dan Lloyd G. (1970:21) Nigro yang dikutip dalam buku buku Pasolong, n.d, (2017) yang berjudul “Teori Administrasi Publik”, mengemukakan bahwa sebagai berikut:

1. (Public Administration) is Cooperative group effort in public setting. (Administrasi Publik) adalah suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintahan.
2. (Public Administration) covers all three branches: executive, legislative and judicial, and their interrelationships. (Administrasi Publik) meliputi ketiga cabang pemerintahan: eksekutif, legislative dan yudikatif serta hubungan di antara mereka.
3. (Public Administration) has an important role formulating of public policy and is thus a part of the political process. (Administrasi Publik) mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah, dan karenanya merupakan sebagian dari proses politik.
4. (Public Administration) is cosely associated with numerous private groups and individuals in providing services to the community. (Administrasi Publik) sangat erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat.
5. (Public Administration) is different in significant ways from private administration. (Administrasi Publik) dalam beberapa hal berbeda pada penempatan pengertian dengan administrasi perseorangan.

Dari uraian diatas peneliti berpendapat bahwa administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam

melaksanakan tugas-tugas pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif melalui penyelenggaraan pelayanan publik dan tercapainya tujuan negara.

Menurut David (2005) yang dikutip dalam buku Pasolong, n.d, (2017) yang berjudul “Teori Administrasi Publik”, mengemukakan bahwa sebagai berikut:

Administrasi publik merupakan pemanfaatan teori-teori dan proses-proses manajemen, politik dan hukum untuk memenuhi keinginan pemerintah di bidang legislatif, eksekutif dalam rangka fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau bagian.

Berdasarkan uraian diatas bahwa administrasi publik berkaitan dengan dunia eksekutif, yudikatif dan legislatif. Peneliti berpendapat bahwa administrasi publik yang berkenaan dengan formulasi dan implementasi kebijakan publik serta berkaitan dengan berbagai masalah manusiawi dan usaha kerja sama untuk mengerjakan tugas-tugas pemerintah.

Pada dasarnya administrasi mempunyai peranan yang sangat krusial dan penting dalam menyelenggarakan pencapaian tujuan dalam proses administrasi negara maupun administrasi publik mengenai tugas-tugas pemerintah maupun merumuskan suatu kebijakan dalam sebuah negara. Administrasi negara, administrasi publik maupun manajemen merupakan sistem yang tidak dapat dipisahkan karena merupakan suatu sistem yang saling berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini untuk mencapai suatu proses tujuan administrasi yang telah ditentukan dengan melibatkan dua orang atau sekelompok orang untuk mencapai suatu sasaran, maka dalam lingkup administrasi tidak terlepas dalam

sebuah wadah organisasi untuk mencapai suatu sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

#### **2.1.4 Pengertian Kebijakan**

Kebijakan Publik merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak melakukan sesuatu maupun untuk melakukan tindakan tertentu.

Dalam kehidupan masyarakat yang ada di wilayah hukum suatu negara sering terjadi berbagai permasalahan. Negara yang memegang penuh tanggung jawab pada kehidupan rakyatnya harus mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Kebijakan publik yang dibuat dan dikeluarkan oleh negara diharapkan dapat menjadi solusi akan permasalahan-permasalahan tersebut.

Kebijakan Publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Untuk memahami lebih jauh bagaimana kebijakan publik sebagai solusi permasalahan yang ada pada masyarakat, kita harus memahami dulu apa dan seperti apa kebijakan publik itu sendiri. Berikut adalah definisi-definisi kebijakan publik menurut para ahli kebijakan publik:

Menurut Thomas R. Dye (1981) dalam buku Indah, et. Al, (2020) yang berjudul “Analisis Kebijakan Publik”

Kebijakan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah (entah itu bertujuan untuk menyelesaikan masalah, meningkatkan sumber daya manusia, menghentikan tindakan terorisme, ataupun lainnya) dan kerja tersebut menghasilkan sesuatu (*what difference it makes*).

Pengertian yang diberikan Thomas R. Dye ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Selain itu, kajiannya yang hanya terfokus pada negara sebagai pokok kajian.

Menurut Easton (1965: 212) dalam Nuryanti, n.d, (2015) yang berjudul “Pemahaman Kebijakan Publik” memaknainya sebagai berikut : “... *the impact of government activity*.” Lebih lanjut Easton menjelaskan, kebijakan publik adalah sebuah keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah yang mempunyai otoritas dalam sistem politik. Mereka ialah, “... para birokrat senior eksekutif, legislatif, para hakim, dan sebagainya”

Berdasarkan uraian diatas bahwa kebijakan adalah aktivitas pemerintah yang mempunyai tujuan, memiliki nilai tertentu dan memberikan dampak (positif) bagi masyarakat luas.

Chief J.O. Udoji (1981) Mendefinisikan kebijaksanaan publik sebagai “ *An sanctioned courseof action addressed to a particular problem or group of related problems that affect society at large.*” Maksudnya ialah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat. Pada sudut pandang lain, Hakim (2003) mengemukakan

bahwa Studi Kebijakan Publik mempelajari keputusan-keputusan pemerintah dalam mengatasi suatu masalah yang menjadi perhatian publik. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah sebagian disebabkan oleh kegagalan birokrasi dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan persoalan publik. Kegagalan tersebut adalah *information failures, complex side effects, motivation failures, rentseeking, second best theory, implementation failures* (Hakim, 2002).

Berdasarkan stratifikasinya, kebijakan publik dapat dilihat dari tiga tingkatan, yaitu kebijakan umum (strategi), kebijakan manajerial, dan kebijakan teknis operasional. Selain itu, dari sudut manajemen, proses kerja dari kebijakan publik dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi

1. Pembuatan kebijakan.
2. Pelaksanaan dan pengendalian.
3. Evaluasi kebijakan.

Menurut Dunn (1994), proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling tergantung, yaitu :

1. penyusunan agenda,
2. formulasi kebijakan,
3. adopsi kebijakan,
4. implementasi kebijakan, dan
5. penilaian kebijakan.

Selain itu teori kebijakan publik membantu kita memahami bagaimana kebijakan dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi. Beberapa model yang relevan termasuk: Model Rasional-Komprehensif: Menekankan analisis rasional dan komprehensif dalam pembuatan kebijakan, Model Inkremental: Menggambarkan kebijakan sebagai serangkaian perubahan kecil yang bertahap, Model Pembuatan Kebijakan Campuran: Mengkombinasikan aspek-aspek dari model rasional dan inkremental.

Dari beberapa rumusan arti kebijakan mengandung beberapa elemen yaitu adanya serangkaian tindakan dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, adanya pemecahan masalah, adanya tujuan tertentu. Bila elemen tersebut dipadukan maka dapat di peroleh suatu pengertian bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang berisi keputusan-keputusan yang di ikuti yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang guna memecahkan masalah untuk mencapai tujuan tertentu.

### **2.1.5 Implementasi Kebijakan**

Teori implementasi kebijakan menjelaskan bagaimana kebijakan diimplementasikan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalannya. Beberapa teori yang relevan termasuk: *Top-Down Approach*: Menekankan peran pemerintah pusat atau pembuat kebijakan dalam mengarahkan implementasi, *Bottom-Up Approach*: Menekankan peran aktor lokal dan implementor di lapangan, Teori Kontingensi: Menyoroti bahwa efektivitas implementasi kebijakan tergantung pada konteks spesifik dan kondisi lokal.



Selain itu implementasi kebijakan merupakan tahap yang sangat penting dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan bisa tercapai. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan tersebut. Menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah:

“Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar *Webster*, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”.

(Webster dalam Wahab, 2005:64). Jadi sesuatu yang dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Solichin Abdul Wahab mendefinisikan implementasi kebijakan secara umum yaitu: “Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”(1997:63).

Menurut Jones (1987), implementasi adalah; *Those activities directed toward putting a program into effect* (proses mewujudkan program hingga

memperlihatkan hasilnya). Sedangkan Mazmanian & Paul Sabatier (1993), *Implementation is the carrying out of basic policy decision usually incorporated in a statute but which can also take the form of important executive orders or court decisions* (implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun bisa pula berbentuk perintah atau petunjuk eksekutif atau keputusan badan peradilan).

Secara Lebih konkrit, Mazmanian & Sabatier menyatakan bahwa fokus perhatian dalam implementasi yaitu memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku, diantaranya adalah kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan yang mencakup usaha mengadministrasikan maupun usaha menimbulkan dampak yang nyata pada masyarakat. Dari uraian di atas diperoleh suatu gambaran bahwa, implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui.

#### **2.1.5.1 Perspektif Teoritik**

Kerangka kerja teoritik berangkat dari kebijakan itu sendiri dimana tujuan-tujuan dan sasaran ditetapkan. Disini proses implementasi bermula. Proses implementasi akan berbeda tergantung pada sifat kebijakan yang dilaksanakan. Macam keputusan yang berbeda akan menunjukkan karakteristik, struktur dan hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sehingga proses implementasi akan mengalami perbedaan. Kebijakan dapat digolongkan menurut karakteristik yang berbeda: jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus menyangkut tujuan antara pemeran serta dalam proses implementasi

berlangsung. Unsur perubahan merupakan karakteristik yang paling penting setidaknya dalam dua hal:

1. Implementasi akan dipengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan sebelumnya. Untuk hal ini perubahan-perubahan inremedial lebih cenderung menimbulkan tanggapan positif dari pada perubahan-perubahan drastis. Seperti telah dikemukakan sebelumnya perubahan inremedial yang didasarkan pada pembuatan keputusan secara incremental pada dasarnya merupakan remedial dan diarahkan lebih banyak kepada perbaikan terhadap tidak kesempurnaan sosial yang nyata sekarang ini dari pada mempromosikan tujuan social dimasa depan. Hal ini sangat berbeda dengan perubahan yang didasarkan pada keutusan rasional yang lebih berorientasi pada perubahan besar dan mendasar. Akibatnya, peluang terjadi konflik maupun tidak sepakatan antar pelaku pembuat kebijakan akan sangat besar.
2. Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Implementasi yang efektif akan sangat mungkin terjadi jika lembaga pelaksana tidak diharuskan melakukan reorganisasi secara drastis. Kegagalan program-program sosial banyak berasal dari meningkatnya tuntutan-tuntutan yang di buat terhadap struktur-struktur dan prosedur-prosedur administratif yang ada.

### 2.1.5.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

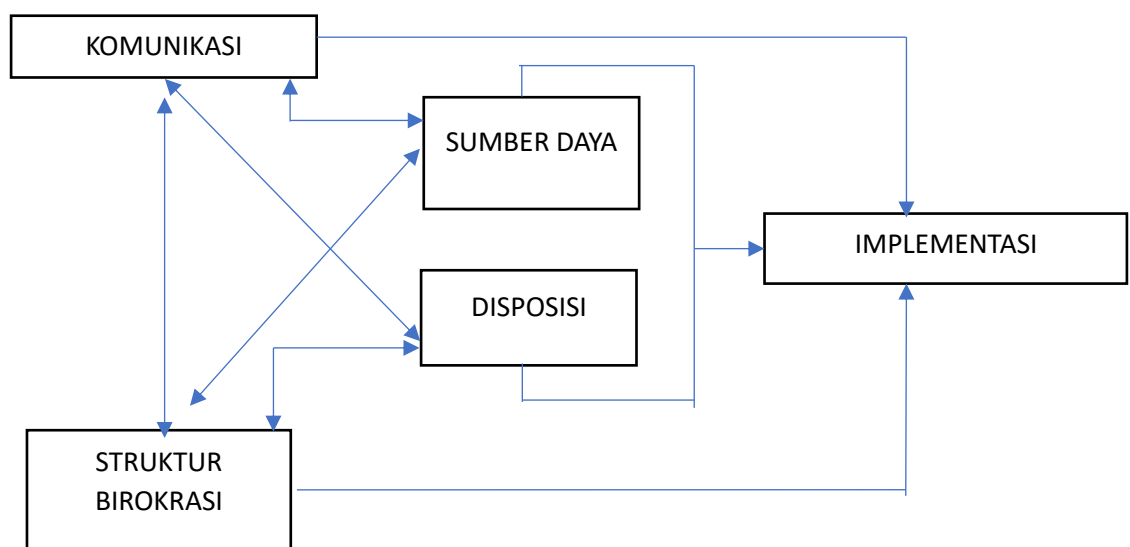
Keberhasilan implementasi dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Ada banyak faktor yang mempengaruhi, para ahli juga memeparkan pendapatnya, antara lain:

#### 1. Model George C Edwards III

Model implemantasi kebijakan ini berperspektif *top down*. Subarsono (2011: 90) berpendapat bahwa faktor-faktor keberhasilan implementasi kebijakan terdiri atas komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Faktor-faktor tersebut tidak hanya berdiri sendiri namun juga saling berkaitan. Berdasarkan pendapat di atas, maka dalam penelitian ini peneliti dapat menjelaskan variabel-variabel keberhasilan implementasi kebijakan sebagai berikut:

Faktor penentu implementasi menurut Edward III

**Bagan 2. 1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan**



### 1. Komunikasi

Agar implementasi kebijakan maka pelaksana harus mengerti apa yang harus dilakukan untuk kebijakan tersebut diantaranya, Kejelasan Instruksi: Instruksi kebijakan harus jelas dan spesifik untuk menghindari kesalahpahaman di antara para pelaksana. Transmisi Informasi: Informasi mengenai kebijakan harus dapat disampaikan dengan efektif dari pembuat kebijakan kepada pelaksana. Konsistensi Informasi: Pesan yang konsisten dan tidak berubah-ubah penting untuk memastikan semua pelaksana memiliki pemahaman yang sama tentang kebijakan.

### 2. Sumber Daya

Selain informasi yang mampu menjadikan kebijakan berhasil adalah sumber daya manusia beserta sumber daya pendukungnya yaitu finansial: Ketersediaan anggaran yang memadai untuk mendukung program-program kebijakan. Personil: Jumlah dan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk melaksanakan kebijakan. Waktu: Waktu yang cukup untuk merencanakan, melaksanakan, dan menilai kebijakan. Fasilitas dan Peralatan: Infrastruktur dan peralatan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan.

### 3. Disposisi (Sikap) Pelaksana

Disposisi merupakan sikap dari pelaksana kebijakan jika pelaksana ingin efektif maka pelaksana harus memiliki sikap komitmen: Tingkat komitmen dan dedikasi pelaksana terhadap kebijakan. Kesadaran: Pemahaman dan pengetahuan pelaksana tentang tujuan dan pentingnya kebijakan. Sikap Positif: Sikap positif dan

dukungan dari pelaksana terhadap kebijakan, yang dapat mempengaruhi motivasi dan kinerja mereka dalam melaksanakan kebijakan.

#### 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan struktur yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan dikarenakan mempunyai pengaruh yang cukup besar untuk keberhasilan kebijakan. Terdapat 2 karakteristik kinerja birokrasi menurut George Cedward III (dalam Agustino, 2006: 153-154). Prosedur dan Standar Operasional: Prosedur yang standar dan jelas untuk memandu pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Tingkat fleksibilitas dalam struktur birokrasi yang memungkinkan penyesuaian kebijakan dengan kondisi lapangan.

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan peneliti akan menggunakan teori milik George C Edward III untuk landasan teori penelitian karna teori ini dianggap peneliti lebih cocok dan memiliki kelebihan yaitu lebih mudah dan jelas untuk digunakan pada pembahasan penelitian ini.

#### **2.1.6 Teori Ketenagakerjaan**

Teori ketenagakerjaan mencakup berbagai konsep yang membantu memahami dinamika pasar tenaga kerja dan pengangguran. Beberapa teori yang relevan termasuk:

1. Permintaan Tenaga Kerja yang ditentukan oleh kebutuhan perusahaan atau pengusaha akan tenaga kerja untuk menghasilkan barang dan jasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja termasuk tingkat upah, produktivitas tenaga kerja, dan permintaan terhadap produk yang

dihasilkan. Penawaran Tenaga Kerja: Ditentukan oleh jumlah individu yang bersedia dan mampu bekerja pada tingkat upah tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja termasuk tingkat upah, kondisi kerja, dan preferensi individu terhadap kerja dan waktu luang.

2. Teori Human Capital diantaranya Investasi dalam Pendidikan dan Pelatihan: Menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja, Tenaga kerja yang lebih terdidik dan terampil cenderung lebih produktif dan memperoleh upah yang lebih tinggi.

Modal Manusia: Pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman kerja dianggap sebagai bentuk investasi yang meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

#### **2.1.6.1 Kompleksitas Masalah Ketenagakerjaan**

Sumber daya manusia mengandung dua pengertian. Pertama, sumber daya manusia mengandung pengertian usaha kerja yang diberikan dalam proses produksi. Dalam hal ini sumber daya manusia mencerminkan kualitas usaha yang diberikan seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang atau jasa. Pengertian kedua dari sumber daya manusia menyangkut manusia yang mampu melaksanakan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu dapat menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Payaman Simanjutak, 1985).

Sumber daya manusia atau sering disebut dengan *human resources* merupakan penduduk secara keseluruhan. Dari segi penduduk sebagai faktor

produksi, maka tidak semua penduduk dapat bertindak sebagai faktor produksi. Hanya penduduk yang berupa tenaga kerja (*man power*) yang dapat dianggap sebagai faktor produksi (Suparmoko, 1997).

Tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah bekerja atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang sedang melakukan kegiatan lain, seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga (Payaman Simanjutak, 1985). Sedangkan menurut Secha Alatas (dalam Fitra Kinca Rizka, 2007) tenaga kerja merupakan bagian dari penduduk yang mampu bekerja untuk memproduksi barang dan jasa. Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menggolongkan penduduk usia 15-64 tahun sebagai tenaga kerja. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), di Indonesia digunakan penetapan umur maksimal berdasarkan kenyataan bahwa dalam umur tersebut sudah banyak penduduk yang sudah bekerja atau mencari pekerjaan.

Menurut Payaman Simanjutak (1985), konsep dari tenaga kerja terdiri atas angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja (*labor force*) merupakan bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif yaitu menghasilkan barang dan jasa. Angkatan kerja ini terdiri atas golongan yang bekerja dan golongan yang menganggur. Golongan yang bekerja (*employed persons*) merupakan sebagian masyarakat yang sudah aktif dalam kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan sebagian masyarakat lainnya yang tergolong siap bekerja dan sedang mencari pekerjaan termasuk di dalam golongan menganggur.



Bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja ataupun mencari pekerjaan, atau bisa dikatakan sebagai bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya tidak terlibat atau tidak berusaha terlibat dalam kegiatan produksi. Kelompok bukan angkatan kerja ini terdiri atas golongan yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga, dan golongan lain yang menerima pendapatan.

Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) memberikan pengertian dan definisi terhadap konsep ketenagakerjaan sebagai berikut:

a) Penduduk

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

b) Umur

Umur seseorang dapat diketahui bila tanggal, bulan dan tahun kelahiran diketahui. Penghitungan umur menggunakan pembulatan ke bawah atau umur menurut ulang tahun terakhir. Umur dinyatakan dalam kalender masehi.

c) Penduduk Usia Kerja

Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas.

d) Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik yang bekerja maupun sementara tidak bekerja karena suatu sebab, seperti menunggu panen, pegawai yang sedang cuti dan sejenisnya. Selain itu, juga termasuk angkatan kerja adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari/ mengharap pekerjaan dan orang yang sudah punya pekerjaan tetapi belum memulai bekerja atau dengan kata lain pengangguran.

e) Bekerja

Kegiatan bekerja didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi dengan menghasilkan barang dan jasa yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit satu jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi.

f) Sementara tidak bekerja

Sementara tidak bekerja adalah mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan tidak melakukan pekerjaan atau bekerja kurang dari satu jam, seperti:

- a) Pekerja tetap, pegawai pemerintah atau swasta yang sedang tidak bekerja karena cuti, sakit, mogok, perusahaan menghentikan kegiatannya sementara (misalnya kerusakan mesin) dan sebagainya.
- b) Petani-petani yang mengusahakan gabah pertanian sedang tidak bekerja karena sakit, menunggu panen atau menunggu hujan untuk menggarap sawah dan sebagainya.

- c) Orang-orang yang bekerja di bidang keahlian seperti dokter, tukang cukur, tukang pijat dan sebagainya sedang tidak bekerja karena sakit atau menunggu pekerjaan berikutnya.

g) Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka meliputi:

- a) Penduduk yang sedang mencari pekerjaan
- b) penduduk yang sedang mempersiapkan suatu usaha
- c) penduduk yang merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan
- d) Penduduk yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja

h) Mencari Pekerjaan

Mencari pekerjaan adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh pekerjaan pada suatu periode waktu.

i) Mempersiapkan Usaha

Memperisapkan usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha yang baru, yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau mempekerjakan buruh/karyawan/pegawai dibayar maupun tidak dibayar.

j) Setengah penganggur

Setengah penganggur adalah penduduk usia kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu atau kurang dari jam kerja normal.

k) Setengah Penganggur sukarela

Setengah penganggur sukarela adalah penduduk usia kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu dan tidak mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha.

l) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT adalah angka yang menunjukkan banyaknya pengangguran, terhadap 100 penduduk yang masuk kategori angkatan kerja.

m) Bukan Angkatan Kerja

Bukan angkatan kerja adalah kelompok penduduk yang selama seminggu yang lalu memunyai kegiatan yang tidak termasuk dalam angkatan kerja seperti:

- a) Sekolah, yaitu mereka yang kegiatannya di rumah.
- b) Mengurus rumah tangga, yaitu mereka yang kegiatan utamanya mengurus rumah tangga atau membantu mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah.
- c) Lainnya, yaitu mereka yang sudah tidak dapat melakukan kegiatan seperti yang termasuk dalam kategori sebelumnya, seperti sudah lanjut usia, cacat jasmani, cacat mental atau lainnya.

n) Pekerjaan Purna Waktu (*Full Time*)

Pekerjaan Purna Waktu adalah pekerjaan yang hanya dilakukan sesuai dengan jam kerja yang berlaku di tempat bekerja dan biasanya merupakan pekerjaan utama.

o) Pekerjaan Paruh waktu (*Part Time*)

Pekerjaan Paruh Waktu adalah pekerjaan yang hanya dilakukan pada sebagian waktu dari jam kerja norma yang berlaku di tempat kerja.

p) Lapangan Usaha

Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari usaha/perusahaan atau instansi tempat seorang bekerja atau pernah bekerja, meliputi:

- a. Pertanian, kehutanan, perkebunan, dan perikanan,
- b. Pertambangan dan penggalian,
- c. Industri pengolahan,
- d. Listrik, gas dan air,
- e. Konstruksi,
- f. Perdagangan, rumah makan dan hotel,
- g. Angkutan, pergudangan dan komunikasi,
- h. Keuangan, asuransi dan usaha persewaan bangunan,
- i. Jasa-jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan lainnya.

q) Jenis Pekerjaan

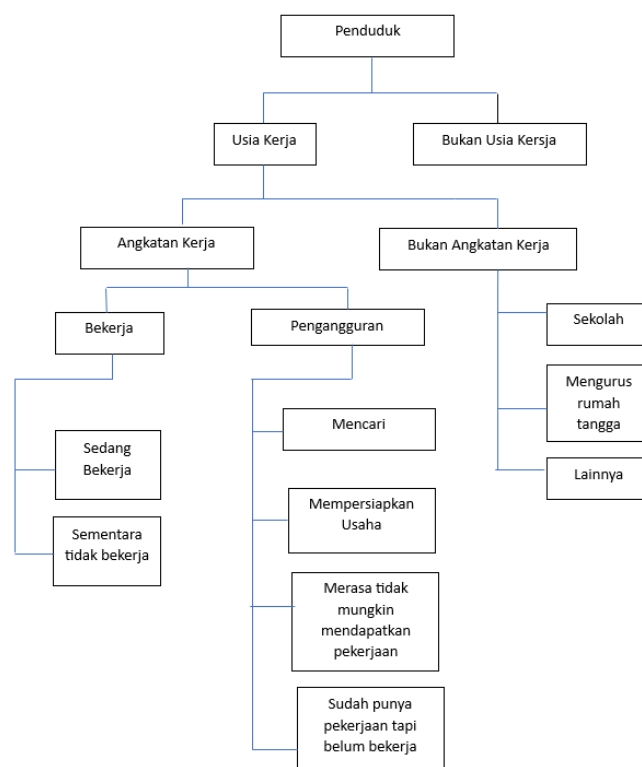
Jenis pekerjaan adalah macam pekerjaan yang sedang dilakukan oleh seseorang yang bekerja, yang dibagi dalam 8 golongan besar yaitu:

- 1) Tenaga profesional
- 2) Kepemimpinan dan ketatalaksanaan,
- 3) Pejabat pelaksana,
- 4) Tenaga tata usaha,
- 5) Tenaga usaha penjualan,
- 6) Tenaga usaha jasa,
- 7) Tenaga usaha pertanian,

- 8) Tenaga produksi dan lainnya (operator alat angkutan, tenaga kasar dll).
- r) Status Pekerjaan Status pekerjaan adalah status kegiatan usaha seseorang yang sedang bekerja, meliputi:
- Berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain,
  - Berusaha dibantu anggota rumah tangga/buruh tidak tetap,
  - Berusaha dibantu buruh tetap,
  - Buruh/ karyawan/ pekerja dibayar.

Konsep Dasar Angkatan Kerja (*Standar Labour Force Concept*) dapat dilihat dalam gambar 2.2 diagram ketenagakerjaan sebagai berikut

**Bagan 2. 2 Diagram Ketenaga Kerjaan**



Sumber : Badan Pusat Statistika (BPS)

### 2.1.5 Masalah Pengangguran

Pengangguran adalah masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, dan kebijakan. Berikut adalah beberapa masalah utama yang sering terkait dengan pengangguran:

1. kesenjangan Keterampilan dan Pendidikan
  - Mismatch Keterampilan: Ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja dan yang dibutuhkan oleh pasar kerja.
  - Kualitas Pendidikan: Sistem pendidikan yang tidak menghasilkan lulusan dengan keterampilan yang relevan dan *up-to-date*.
2. Pertumbuhan Ekonomi yang Tidak Merata
  - Sektor Formal vs Informal: Ketimpangan antara peluang kerja di sektor formal dan informal, di mana sektor informal sering kali tidak menawarkan jaminan sosial dan upah yang memadai.
  - Distribusi Pekerjaan: Ketidakmerataan distribusi pekerjaan antara pusat kota dan daerah pinggiran.
3. Migrasi dan Urbanisasi
  - Urbanisasi Cepat: Pertumbuhan penduduk kota yang cepat akibat migrasi dari daerah lain, yang menyebabkan tekanan pada pasar tenaga kerja dan infrastruktur kota.
  - Pendatang Baru: Pendatang baru yang sering kali tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja kota, sehingga meningkatkan tingkat pengangguran.
4. Fluktuasi Ekonomi

- Ketidakstabilan Ekonomi: Fluktuasi ekonomi yang mempengaruhi investasi dan penciptaan lapangan kerja. Krisis ekonomi atau resesi dapat menyebabkan peningkatan pengangguran.
  - Inflasi dan Biaya Hidup: Tingginya biaya hidup yang tidak sebanding dengan kenaikan upah, yang mempengaruhi daya beli dan kesejahteraan tenaga kerja.
5. Teknologi dan Automasi
- Automasi Pekerjaan: Peningkatan penggunaan teknologi dan automasi dalam industri tertentu yang mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja manusia.
  - Kesiapan Tenaga Kerja: Banyak tenaga kerja yang belum siap dengan perubahan teknologi dan kurang memiliki keterampilan digital.
6. Regulasi dan Kebijakan Ketenagakerjaan
- Regulasi yang Ketat: Beberapa regulasi ketenagakerjaan yang terlalu kaku dapat menghambat fleksibilitas pasar tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja baru.
  - Birokrasi: Proses administrasi dan birokrasi yang rumit yang dapat menghambat pengusaha dalam membuka usaha baru dan menciptakan lapangan kerja.
7. Faktor Sosial dan Demografis
- Demografi: Pertumbuhan populasi usia produktif yang lebih cepat daripada penciptaan lapangan kerja.



- Kesenjangan Gender: Ketidaksetaraan kesempatan kerja dan upah antara pria dan wanita.
- Diskriminasi: Diskriminasi berbasis usia, jenis kelamin, ras, atau faktor lainnya yang membatasi akses ke pekerjaan.

#### 8. Lingkungan dan Infrastruktur

- Transportasi dan Aksesibilitas: Infrastruktur transportasi yang kurang memadai yang mempengaruhi mobilitas tenaga kerja.
- Fasilitas Publik: Kurangnya fasilitas pendukung seperti pusat pelatihan kerja yang dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja.

#### 9. Kondisi Kesehatan

- Kesehatan Tenaga Kerja: Masalah kesehatan yang membatasi kemampuan individu untuk bekerja, seperti penyakit kronis atau disabilitas.
- Pandemi: Situasi seperti pandemi COVID-19 yang dapat menyebabkan penutupan bisnis dan kehilangan pekerjaan secara besar-besaran.

#### 10. Kendala pada Pasar Kerja

- Informasi Pasar Kerja: Kurangnya informasi tentang peluang kerja yang tersedia dan cara mengaksesnya.
- Mobilitas Tenaga Kerja: Hambatan untuk berpindah tempat kerja atau berpindah lokasi akibat biaya pindah atau ikatan keluarga.

### **2.1.6 Efektifitas**

Efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan, dengan kata lain Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dijelaskan pula bahwa efektivitas adalah

hubungan antara keluaran *output* (atau pertanggungjawaban dengan sasaran yang harus dicapai). Keefektivitas merupakan tingkat dimana suatu program mencapai tujuannya atau memproduksi efek-efek tertentu.

Menurut Amiruallah dan Rabdyah Hanafi (2002) dalam bukunya “Pengantar Manajemen” mengemukakan bahwa : “Efektivitas menunjukkan pada kemampuan suatu organisasi dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan secara tepat. Pencapaian sasaran yang sudah ditentukan dengan ukuran maupun standar yang berlaku mencerminkan suatu perusahaan organisasi tersebut sudah memperhatikan efektivitas operasionalnya

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya (Sondang P. Siagian, 2001:24).

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan pencapaian tujuan dari suatu kegiatan atau program serta memiliki ketetapan waktu yang efektif dalam suatu kegiatan apabila penyelesaiannya atau pencapaian tujuan yang sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan memiliki manfaat bagi organisasi dan masyarakat.

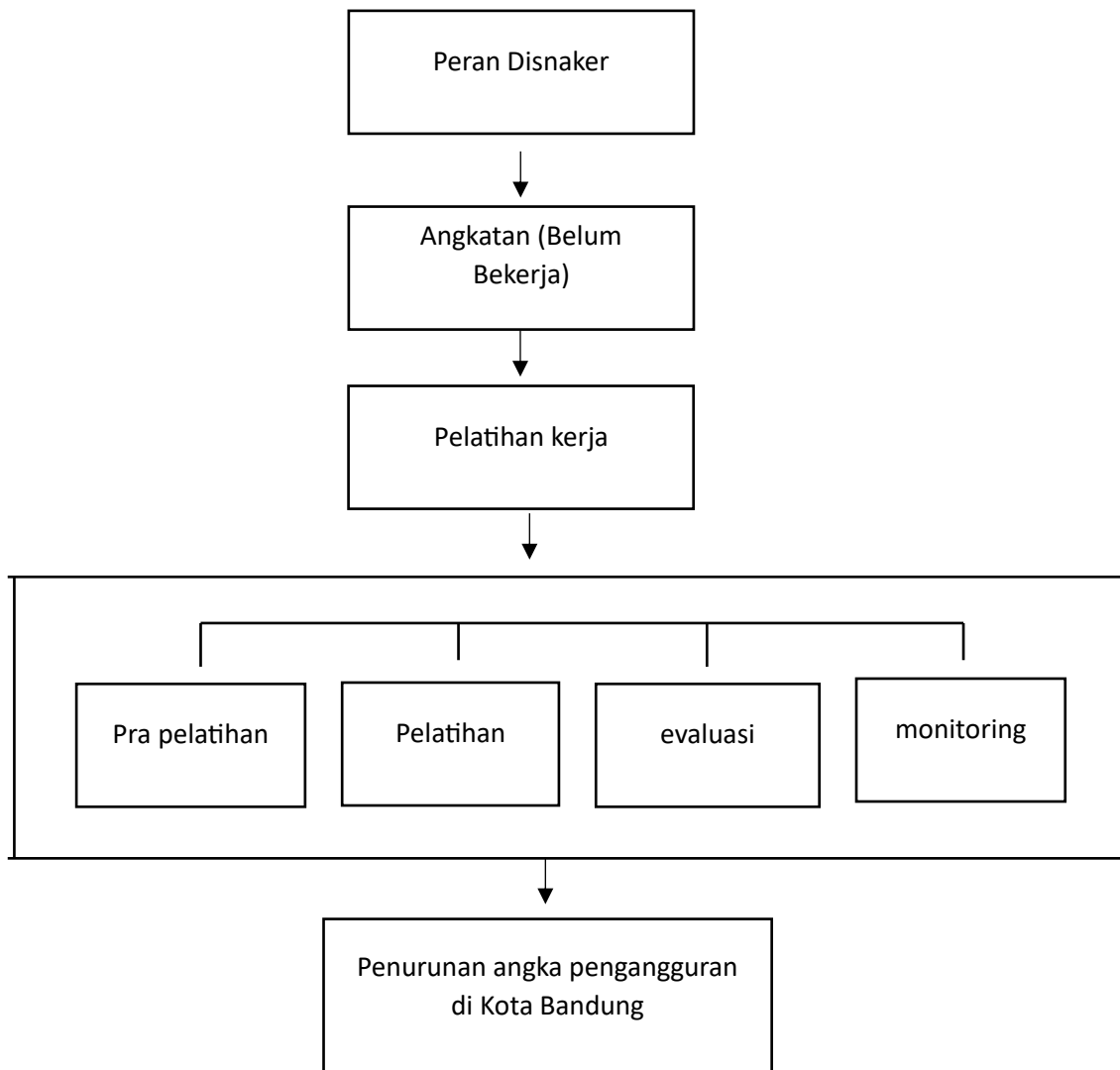
## 2.2 Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran dibuat berupa skema sederhana yang menggambarkan secara singkat proses pemecahan masalah yang dikemukakan oleh peneliti. Skema sederhana yang dibuat, kemudian dijelaskan secukupnya mengenai mekanisme kerja faktor-faktor yang muncul.

Kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai hal yang penting. Maka, dapat disimpulkan bahwa kerangka berpikir merupakan rancangan atau pola pikir yang menjelaskan hubungan antara variabel atau permasalahan yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan untuk dianalisis dan dipecahkan sehingga dapat dirumuskan sebuah hipotesis kerangka berpikir sebagai berikut:

Didalam kerangka berpikir variabel-variabel penelitian dicancang untuk memberikan panduan dalam memahami dan menganalisis kebijakan penanggulangan pengangguran di Kota Bandung dengan fokus pada peran dan kontribusi Disnaker. Kerangka ini membantu masalah mengidentifikasi masalah utama, kebijakan yang diterapkan, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dimasa depan.

Dengan demikian gambaran jelasnya penelitian secara keseluruhan dapat diketahui secara jelas dan terarah melalui bagan 2.3

**Bagan 2. 3 Kerangka Berpikir**

(Sumber: Peneliti 2024)

### 2.3 Proposisi

Proposisi adalah pernyataan yang menyatakan sesuatu sebagai fakta atau argumen yang dapat dipertimbangkan, selain itu proposisi merupakan pernyataan yang menjelaskan kebenaran atau tentang perbedaan dan hubungan antara beberapa konsep. Dapat dikatakan bahwa proposisi merupakan penyebab hubungan logis dari beberapa konsep. Sebuah proposisi dinyatakan dengan menggunakan pernyataan

yang menjelaskan hubungan antara beberapa konsep. Berdasarkan uraian pada kerangka berpikir, berikut yang menjadi proposisi dari penelitian mengenai implementasi kebijakan penanggulangan pengangguran di Kota Bandung (Studi Kasus Dinas Tenaga kerja), maka proposisi penelitian ini adalah mencari kebijakan penanggulangan pengangguran berdasarkan teori George C Edward III: Mereka menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada empat faktor utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Dalam konteks kebijakan pengangguran, penerapan keempat faktor ini akan menentukan apakah kebijakan tersebut dapat mengurangi angka pengangguran secara efektif atau tidak. Misalnya, jika ada masalah dalam komunikasi atau kekurangan sumber daya, kebijakan yang dirancang dengan baik sekalipun mungkin tidak akan mencapai tujuannya.